BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konsep hal ihwal kegentingan yang memaksa telah ada bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu dalam pasal 5 draf rancangan UUD yang disusun oleh Soepomo, Soebardjo dan Maramis. Dalam UUD 1945, hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat untuk pembentukan perppu terdapat dalam pasal 22 UUD 1945. Walaupun UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, akan tetapi konsep kegentingan yang memaksa tidak mengalami perubahan secara substansial dalam UUD 1945.

Hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan suatu kondisi dimana negara berada dalam keadaan darurat. Sementara itu, dalam UUD 1945 Indonesia mengenal dua konsep keadaan darurat yaitu kegentingan yang memaksa yang ditegaskan dalam pasal 22 UUD 1945 dan keadaan bahaya yang ditegaskan dalam 12 UUD 1945. Konsep keadaan darurat dalam pasal 12 UUD 1945 sangat berbeda dengan konsep darurat dalam pasal 22 UUD 1945. Kegentingan yang memaksa tidaklah selalu merujuk pada keadaan bahaya (*dangerous threat*). Frasa kegentingan yang memaksa dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang ditafsirkan oleh presiden bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan pengaturan akan tetapi tidak dimungkinkan untuk melakukan proses legislasi biasa karena adanya keterbatasan waktu sehingga dibentuklah perppu untuk mengatasi hal tersebut.

Adapun mengenai pembentukan perppu di Indonesia juga masih terus menjadi pembahasan yang penting karena besarnya kekuasaan presiden dalam membuat peraturan tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Walaupun pada akhirnya perppu tersebut harus diajukan ke DPR untuk disetujui menjadi undang-undang, akan tetapi DPR hanya bisa memberikan pernyataan diterima atau ditolak terkait perppu yang diajukan presiden tanpa bisa merevisi sebagian atau seluruh ketentuan dalam perppu. Sehingga, dalam menentukan apakah sebuah perppu telah sesuai dengan syarat hal kegentingan yang memaksa sangat bergantung pada subjektivitas presiden dalam memandang kegentingan yang memaksa. Lebih lanjut, walaupun perppu bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi, akan tetapi hingga saat ini belum ada perppu yang telah diujikan oleh Mahkamah Konstitusi hingga pada pokok perkara terkait dengan penafsiran presiden mengenai hal kegentingan yang memaksa sebagai syarat penerbitan perppu. Sehingga, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji perppu harus menyediakan mekanisme pengujian perppu di

Mahkamah Konstitusi terkait dengan penafsiran hal ihwal kegentingan yang memaksa oleh presiden yang seharusnya berbeda dengan pengujian undang-undang biasa. Selain itu, berdasarkan permasalahan mengenai keberadaan perppu yang ketika diajukan ke DPR, DPR hanya bisa menyatakan menerima atau menolak perppu perlu untuk dikaji kembali mengenai ketentuan tersebut. Perlu adanya penguatan fungsi DPR sebagai salah satu proses mekanisme *check and balances* antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Hal ini berdasarkan pada pembahasan mengenai belum adanya mekanisme pengujian perppu yang berbeda dengan pengujian undang-undang biasa serta terkait dengan konsep kegentingan yang memaksa sebagai salah satu keadaan darurat yang sangat berbeda dengan keadaan bahaya dimana dalam keadaan bahaya, tindakan yang diambil oleh presiden bebas dari pengujian di Pengadilan.

Lebih lanjut, dalam Perppu No.2 Tahun 2020, kegentingan yang memaksa tersebut dapat dilihat dari pertimbangan faktor kekosongan hukum dan persoalan kekosongan jabatan kepala daerah. Kegentingan yang memaksa dalam perppu ini berfokus pada bagaimana agar pilkada 2020 tetap dapat dilaksanakan dengan diterbitkannya Perppu No.2 Tahun 2020. Sehingga, kekosongan hukum yang dimaksud dalam perppu ini dapat dimaknai sebagai tidak adanya ketentuan yang mengatur penundaan pelaksanaan pilkada secara nasional yang apabila ditunda akan berdampak pada terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah dan rencana pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024.

Padahal, UU No. 10 Tahun 2016 sudah mengatur mengenai mekanisme atas hal tersebut yaitu melalui mekanisme PJ untuk kekosongan jabatan kepala daerah pada 2022 dan 2023 yang bisa dijadikan langkah antisipasi dan jalan keluar atas situasi tersebut. Walaupun dalam pengaturan UU No.10 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan Pilkada 2020, akan tetapi adanya pengaturan terkait dengan pengisian jabatan pada Pilkada 2022 dan 2023 bisa dijadikan acuan untuk melakukan revisi terbatas undang-undang tersebut atau lebih jauh bisa diatur langsung dalam Perppu No.2 Tahun 2020.

Daftar Pustaka

Buku

- Alrasyid, Harun. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Azed, Abdul Bari. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Farida Indrati S, Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Kansil, C.S.T. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 1986.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2000.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sarundajang. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*. Jakarta: Sinar Harapan, 2012.
- Yuningsih, Tri. *Kajian Birokrasi*, Semarang: Dept. Administrasi Publik Press FSIP-UDIP, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 160 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005. *Pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009. *Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pemohon: Saor Siagian, dkk. 8 Februari 2010.

Jurnal

Arsil, Fitra. Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 48 No 1* (2018), diakses pada 14 Februari 2021, <http://dx.doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>.

Arif, Mokhammad Samsul “Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, (2020), diakses pada 10 Agustus 2021, <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197>.

Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, (2017), diakses pada 1 Mei 2021, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a1>

- Nazriyah Riri, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”, *Jurnal Hukum*, (2010), hlm.387, diakses pada 1 Mei 2021, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art3>.
- Nuriyanto. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?”, *Jurnal Konstitusi Vol 11 No.3*, (2014), diakses pada 24 Februari 2021, <https://jurnalkonstitusi.MahkamahKonstitusi.id/index.php/jk/article/view/34/33>.
- Rahmi, Novrieza “Sejarah Munculnya Istilah Perppu dan ‘Cermin’ Subjektivitas Presiden”, *hukumonline.com*, diakses pada 1 Mei 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a860340566c/sejarah-munculnya-istilah-perppu-dan-cermin-subjektivitas-presiden/>.
- Rohim, Nur “Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa”, *Jurnal Cita Hukum*, (2014), diakses pada 28 Juni 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/76008-ID-kontroversi-pembentukan-perppu-nomor-1-t.pdf>.
- Ridho Imawan Hanafi. “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik”, *Jurnal Penelitian Politik Vol 11 No.2* (2014), diakses pada 15 Februari 2021, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/197>.
- Sukrino, Didik. “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, diakses pada 8 Februari 2021. https://www.MahkamahKonstitusi.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN%20Vol%202%20no%201.pdf.
- Supriyadi. “Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (2020), diakses pada 30 Juli 2021, <https://doaj.org/article/024f7226b20449a4b476fea5d366a5fe>.
- Simamora, Janpatar “Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis”, *Jurnal Mimbar Hukum Vol.23* (2011), diakses pada 16 Februari 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/40502-ID-eksistensi-pemilukada-dalam-rangka-mewujudkan-pemerintahan-daerah-yang-demokrati.pdf>.
- Zamroni, Mohammad “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (President’s Authority To Issue perppu)”, (2015), diakses pada 1 Mei 2021, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/410/290>.

Situs dan Media

- DCAF, “What Is State of Emergency”, Backgrounder Security Sector Governance and Reform”. October 2005. Diakses pada 28 Juni 2021. https://www.files.ethz.ch/isn/14131/backgrounder_02_states_emergency.pdf.
- Debora, Yantina. “Riwayat Kasus Corona di Indonesia, dari Maret hingga September 2020”. *Tirto.id*, 11 September 2020. Diakses pada 4 Februari 2021. <https://tirto.id/riwayat-kasus-corona-di-indonesia-dari-maret-hingga-september-2020-.f4d6>.
- Dewi, Retia Kartika. “Pro dan Kontra Menanggapi Pilkada di Tengah Pandemi”. *Kompas.com*, 24 September 2020. Diakses pada 14 Februari 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/061500865/pro-dan-kontra-menanggapi-pilkada-di-tengah-pandemi-corona-?page=all>.
- Hamdi, Imam. “PSBB DKI Fase 3, Kebijakan Pusat dan Daerah Diminta Lebih Sinkron”. *Tempo.co*, 21 Mei 2020. Diakses pada 25 Februari 2021. <https://metro.tempo.co/read/1344700/psbb-dki-fase-3-kebijakan-pusat-dan-daerah-diminta-lebih-sinkron>.
- Hantoro, Novianto Murti. “Tindak Lanjut Perppu Penundaan Pilkada”. *Dpr.go.id*, Mei 2020. Diakses pada 16 Februari 2020. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-10-II-P3DI-Mei-2020-187.pdf.
- Hidayatullah, Taufiq. “Pilkada 2020: Pertaruhan Ekonomi, Nyawa dan Kekosongan Jabatan”. *Lokadata.id*, 11 September 2020. Diakses pada 5 Agustus 2021. <https://lokadata.id/artikel/pilkada-2020-pertaruhan-ekonomi-nyawa-dan-kekosongan-jabatan>.
- Idea. “Mengelola Pemilu selama Pandemi COVID-19 Pertimbangan bagi para pembuat Kebijakan”. *Idea.int*, 19 October 2020. Diakses pada 16 Februari 2020. <https://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-during-covid-19-pandemic-considerations-decision-makers?lang=id>.
- Indonesia, CNN. “Lampu Kuning Pilkada Serentak 2020 di Tengah Wabah Corona”. *CNN Indonesia*, 26 September 2020. Diakses pada 31 Juli 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201125202439-32-574543/lampu-kuning-pilkada-serentak-2020-di-tengah-wabah-corona>.
- Jakarta, LBH. “Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia Pasca 20 Tahun Reformasi”. *Bantuanhukum.or.id*, 9 April 2019. Diakses pada 16 Agustus 2021. <https://bantuanhukum.or.id/demokrasi-dan-negara-hukum-indonesia-pasca-20-tahun-reformasi/>.

- Kemenkumham. “Perppu”. *Peraturan.go.id*, 26 Agustus 2021. Diakses pada 1 Juli 2021. <https://peraturan.go.id/perppu.html>.
- Kholis, Nur. “Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Publik”. 16 September 2020, *Lipi.go.id*. Diakses pada 9 Februari 2021. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417-pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik>.
- Kompas. “Catatan Kasus Covid-19 di Pilkada 2020: Penyelenggara dan Peserta Tertular Hingga Meninggal”. *Kompas.com*, 03 Oktober 2020. Diakses pada 31 Juli 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/03/11231181/catatan-kasus-covid-19-di-pilkada-2020-penyelenggara-dan-peserta-tertular?page=all>.
- _____. “Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt”. *Kompas.com*, 22 September 2020. Diakses pada 10 Agustus 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/15340721/pilkada-2020-tetap-digelar-mahfud-pemerintah-tak-ingin-ada-kepala-daerah-plt?page=all>.
- Mashabi, Sania. “KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014”, *Kompas.com*, 2 Februari 2020. Diakses pada 10 Agustus 2021. <https://pemilu.kompas.com/rumahpilkada/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014>.
- Perludem. “Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket”. *Perludem.org*, 2 Oktober 2020. Diakses pada 7 Februari 2021. <http://perludem.org/2020/10/02/bandingkan-dengan-negara-lain-perludem-kita-berpilkada-saat-angka-covid-19-meroket/>.
- _____. “Perludem: Menunda Pilkada bukan kegagalan berdemokrasi”. *Perludem.org*, 20 September 2020. Diakses pada 4 Februari 2021. <http://perludem.org/2020/09/20/perludem-menunda-pilkada-bukan-kegagalan-berdemokrasi/>.
- PSHK. “Minim Partisipasi Rentan Represi”, *PSHK.or.id*, 23 September 2020. Diakses pada 16 Februari 2020. <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/minim-partisipasi-rentan-represi/>.
- Putra, Muhammad Amin. “Melihat Kembali Perppu 1 Tahun 2016”. *Leip.or.id*, 20 Juni 2016. Diakses pada 25 Agustus 2021. <https://leip.or.id/melihat-kembali-perppu-1-tahun-2016/>
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. “Belajar dari Sukses Korsel Gelar Pemilu Saat Corona Untuk Pilkada 2020”. *Katadata.co.id*, 27 April 2020. Diakses pada 7 Februari 2021.

<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5ea67f719300d/belajar-dari-sukses-korsel-gelar-pemilu-saat-corona-untuk-pilkada-2020>.

Salabi, Amalia “Perludem Dorong Presiden Jokowi Terbitkan Perpu”. *Rumahpemilu.org*, 27 Maret 2020. Diakses pada 31 Juli 2021. <https://rumahpemilu.org/tunda-pilkada-2020-perludem-dorong-presiden-jokowi-terbitkan-perpu/>.

Syam, Radian. “2/2020 di Tengah Pandemi Covid-19”. *Hukumonline.com*, 18 Mei 2020. Diakses pada 4 Februari 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec352fc13cd1/Perppu-2-2020-di-tengah-pandemi-Covid-19-oleh--radian-syam/>.

Tribbunnews.com, “Draf RUU Pemilu Cantumkan Jadwal Pilkada 2022, Perludem: Kami Dukung Normalisasi Jadwal Pilkada”. *Perludem.org*, 28 Januari 2021. Diakses pada 9 Agustus 2020. <http://perludem.org/2021/01/28/draf-ruu-pemilu-cantumkan-jadwal-pilkada-2022-perludem-kami-dukkung-normalisasi-jadwal-pilkada/>.

Utami. “Permohonan Dicabut Karena Perppu Pilkada Menjadi UU”. *Mahkamah Konstitusi.ri.id*, diakses pada 13 Februari 2021. <https://www.MahkamahKonstitusi.id/index.php?page=web.Berita&id=16449>.

Wasisto, Aryo dan Prayudi. “Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020”. *Dpr.go.id*, Juni 2020. Diakses pada 6 Februari 2021. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-2063.pdf.

Yuliani, Andi. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa Ke Masa”. *Kemenkumham.go.id*, diakses pada 28 Juni 2021, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180.

Wawancara

Wawancara dengan Fritz Edward Siregar S.H., LL.M., Ph.D. Anggota Bawaslu RI, di Kantor Bawaslu RI pada 9 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bivitri Susanti, S.H., LL.M. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, melalui Zoom pada 2 Agustus 2021.

Lampiran

Daftar Pertanyaan kepada Fritz Edward Siregar S.H., LL.M., Ph.D, Anggota Bawaslu RI

1. Pada 21 September 2020, Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP menyepakati pelaksanaan pilkada pada Desember. Apa pertimbangan utama, khususnya Bawaslu terkait dengan hal tersebut? Mengingat banyak pihak yang menolak pelaksanaan pilkada pada Desember 2020.
2. Dari penjelasan terkait pertanyaan pertama, bagaimana dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan pada Pilkada 2022 dan 2023?
3. Kenapa mekanisme pengisian kekosongan jabatan melalui PJ tidak digunakan untuk penundaan pelaksanaan pilkada 2020?
4. Terdapat 16 daerah yang melakukan permohonan pemungutan suara ulang ke Mahkamah Konstitusi pada 2020 dan merupakan permohonan yang terbanyak sejak 2015. Faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Seperti apa tanggapan bapak mengenai hal tersebut?
5. Apa tantangan terbesar Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada dalam pelaksanaan pilkada 2020?

Daftar Pertanyaan kepada Bivitri Susanti, S.H., LL.M. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

1. Menurut Mba, seperti apa hal ihwal kegentingan yang memaksa yang digunakan presiden sebagai dasar penerbitan perppu dari masa ke masa? Bisa diceritakan sejarah dan perkembangannya sejauh ini?
2. Mahkamah Konstitusi telah memberikan panduan akan syarat-syarat untuk penerbitan perppu terkait dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apakah ada contoh negara lain yang memiliki ketentuan semacam perppu dan lembaga khusus yang secara pasti memberikan batasan mengenai tafsir hal ihwal kegentingan yang memaksa
3. Bagaimana menurut Mba terkait dengan perppu No.2 Tahun 2020 yang mengatur tentang penundaan pelaksanaan pilkada ke Desember 2020? Apakah hal tersebut termasuk intervensi kepada KPU? Apakah ada kaitannya dengan independensi KPU terkait dengan penentuan waktu tersebut?

4. Secara konsep dan kelembagaan, apakah Mahkamah Konstitusi bisa langsung menentukan dalam putusannya terkait dengan batasan atas penafsiran hal ihwal kegentingan yang memaksa?
5. Bagaimana pendapat Mba terkait dengan panduan untuk penafsiran hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi? Seperti apa penerapannya berdasarkan putusan-putusannya dalam pengujian perppu di Indonesia?
6. Bagaimana pendapat Mba terkait dengan pengaturan waktu yang spesifik dalam Perppu No.2 Tahun 2020 dan kaitannya dengan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pilkada?